



PEMERINTAH DIDESAK AMBIL LANGKAH KONKRET

Tumpukan Sampah di Depo Kian Tak Terbendung

YOGYA (KR) - Tumpukan sampah di seluruh depo di Kota Yogyakarta tidak terbendung. Volume sampah rata-rata per hari mencapai 240 ton.

Karena menumpuk dalam jumlah besar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta harus menyemprot sampah dengan desinfektan untuk menghambat penyebaran bakteri. Demikian pula di Sleman, tumpukan sampah di seluruh depo, diperkirakan mencapai 500 ton.

"Tumpukan sampah mengganggu masyarakat karena itu tidak kita inginkan. Tapi kami khawatir akan muncul banyak lalat maupun belatung bahkan penyebaran bakteri. Makanya seluruh depo sampah kami semprot desinfektan," jelas Kepala DLH Kota Yogyakarta, Suyana, Rabu (27/3).

Tital ada sembilan depo sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Seluruhnya dalam kondisi penuh dan tidak lagi mampu menampung sampah baru. Hal itu belum termasuk TPS di berbagai wilayah yang jumlahnya mencapai sekitar 115 unit.

Suyana berharap, di samping menghambat perkembangan bakteri, penyemprotan desinfektan juga bisa memperlambat pembusukan sampah basah. Namun demikian, pihaknya tetap meminta kerja sama serta kepedulian masyarakat dalam memperlakukan sampah. "Kami berharap TPST Pyunggan bisa segera dibuka," harapnya.

Kepala UPT Pelayanan Persampahan Kabupaten Sleman Restuti, Rabu (27/3) mengatakan, setiap harinya pihaknya mengambil sekitar 160 ton sampah untuk dibawa ke TPST Pyunggan. Dengan adanya penutupan itu, secara otomatis sampah-sampah menumpuk. "Sekarang ini ada sekitar 500 ton sampah yang menumpuk di depo, TPS maupun di rumah tangga. Hal itu dikarenakan sampah-sampah tidak bisa diangkat ke Pyunggan," kata Restuti.

Dengan adanya penutupan tersebut, pihaknya telah mensosialisasikan ke sopir-sopir truk untuk tidak mengambil sampah. Harapannya sosialisasi itu juga diteruskan ke orang-orang yang membuka jasa pembuangan sampah dari masyarakat.

Dari kejadian ini, semakin menguatkan keinginan segera memiliki TPST di Kabupaten Sleman. Namun permasalahan yang ada saat ini belum mendapat lokasi.

"Kami berharap Sleman segera punya TPST sendiri. Untuk lokasinya masih dicari yang cocok," tuturnya.

Pantauan di Pasar Condonggegar, Sleman terjadi penumpukan di tempat pembuangan sampah. Kru armada Disperindag Sunaryo kepada KR kaget dengan kondisi tempat pembuangan sampah di pasar-pasar.

* Bersambung hal 7 kol 1



KR-Franz Boedoko/kamarta

Tumpukan

Ketika tiba di Pasar Condonggegar, volume sampah biasanya tidak sampai 2 meter tingginya. Namun sekarang sampai melebar ke jalan.

Sementara itu, setelah warga bersukuh tidak akan membuka blokade sebelum tuntutan dipenuhi, kini Paguyuban Jasa Pengambilan Sampah di Masyarakat Eker-eker Golek Menir bereaksi keras dan menuntut pemerintah segera mengambil langkah konkret atas persoalan itu. "Anggota paguyuban itu seluruhnya mencapai 150 orang. Misalnya setiap hari satu armada minimal membawa satu ton, tinggal mengalikan sejak Sabtu (23/3) hingga kini belum kami ambil karena tidak masuk TPST. Berarti ada ratusan ton sampah tidak bisa diambil," ujar Ketua Paguyuban Eker-eker Golek Menir Sodik Mawanta, Selasa (26/3).

Sodik mengatakan, setiap hari sejak penutupan akses menuju TPST Pyunggan, pihaknya terus mendapat pertanyaan pelanggan sebab sampah tidak diambil. Sehingga jalan satu-satunya hanya memberi tahu

Sambungan hal 1

pah hingga tingkat dusun tanpa adanya peran dari paguyuban," ujarnya.

Rustam Fatohi mengungkapkan, waktu TPST Pyunggan dikelola kabupaten justru lebih baik. Sebaliknya ketika diambil alih Pemerintah DIY justru kondisinya carut marut seperti ini. "Saya dengar pengelolaan TPST justru dipihakketgakan. Artinya karyawan TPST itu di bawah pihak ketiga. Ini persoalan besar kok justru pihak ketiga yang mampu," ujarnya. Kenyataan itu jadi indikasi kegagalan pemerintah dalam mengelola sampah di TPST Pyunggan.

Anggota Komisi C DPRD Bantul Damba Aktifis, mengatakan pihaknya tidak henti-hentinya melakukan koordinasi dalam penanganan sampah. Namun sejauh ini memang tidak bisa masuk terfali dalam karena semua di bawah Pemerintah DIY. "Paling penting harus ada koordinasi dengan Pemerintah DIY, kondisinya sudah sangat serius. Kami hanya bisa minta agar tong sampah dikembangkan di masyarakat, itu saja."

Fatoni, menyayangkan kegagalan Pemerintah DIY dalam mengelola sampah. Banyak persoalan di TPST Pyunggan tidak kunjung selesai. Terjadinya blokade jalan oleh warga sebenarnya akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah. Dampak dari aksi itu sangat luas, termasuk paguyuban jasa pengambil sampah yang tidak bisa membawa sampah masuk ke TPST. "Padahal kawan-kawan paguyuban ini ujung tombak dalam menangani sampah hingga tingkat di dusun. Sulit rasanya

Penyemprotan desinfektan oleh petugas DLH Kota Yogyakarta di depo sampah.

"Sejak Sabtu pekan lalu kami tidak bisa membuang sampah, artinya sampah masih di rumah warga atau depo," ujarnya.

Sodik minta pengelola TPST Pyunggan tidak pilih kasih karena meski ditutup masih ada armada membuang sampah lewat pintu belakang. Jika memang ditutup, jangan ada warga sekitar membuang sampah di TPST. Penilaian itu setelah Paguyuban Eker-eker Golek Menir menemukan armada plat hitam bisa membuang sampah. Sementara itu tokoh masyarakat

DLH
 ✓ Netral
 ✓ Segera
 ✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005